BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Kabupaten Bulungan pada mulanya merupakan bagian dari Kalimantan Timur. Pada tahun 2012 terjadi pemekaran Wilayah Kalimantan Utara, sehingga dan Kabupaten Bulungan termasuk di dalamnya. Tujuan pemekaran wilayah Kalimantan Utara yaitu terjaminnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pada aspek pelayanan masyarakat. Khususnya di Kabupaten Bulungan, salah satu strategi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mengelola potensi daerah yang ada secara optimal sehingga dapat bermanfaat secara ekonomi baik untuk pendapatan negara, provinsi Kalimantan Utara, daerah Kabupaten Bulungan, dan terutama masyarakat di Kabupaten Bulungan. Kecamatan di Kaupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara antara lain Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Bunyu, dan Kecamatan Sekatak. Perekonomian yang berdasar pada sumber daya alam di kabupaten Bulungan, didominasi oleh pertanian dan pertambangan.

Potensi daerah Kabupaten Bulungan dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bulungan disebutkan bahwa pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah,

efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentan kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

Rencana Kerja Kaupaten Bulungan tahun 2017 yaitu disesuaikan dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 15 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan tahun Anggaran 2017. Kabupaten Bulungan dikaji dari sisi kinerja aparatur pemerintah daerahnya, dapat dilihat dari pengelolaan perekonomian pemerintah daerah, tugas dan wewenang aparatur pemerintah daerah, perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, cara pemerintah menangani permasalahn-permasalahan perekonomian, dan wujud pelayanan pemerintah dalam kaitannya dengan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bulunan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala bidang penerimaan dan Pengeluaran Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan, diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut.

3.1.1. Pengelolaan perekonomian pemerintah daerah

Perekonomian Pemerintah daerah besar kaitannya dengan pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah sehingga elemen yang berpengaruh antara lain:

Menurut kepala Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan Bulungan. Elemen yang berpengaruh ialah, aparat daerah termasuk di dalamnya yaitu eksekutif dan legislatif yang berperan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan termasuk di dalamnya aspek pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. APBD merupakan alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Pihak swasta yaitu sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah karena tidak semua kegiatan bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah pembangunan infrastuktur yang baik akan menunjang kegiatan perekonomian. Masyarakat, segala kebijakan yang telah dibuat oleh

Pemerintah daerah tidak akan bisa berjalan efektif tanpa ada dukungan dari masyarakat. Masyarakat sebagai sasaran kebijakan juga merupakan media evaluasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kebijakan yang dibuat tapi bersifat kontra dengan masyarakat akan sulit dilaksanakan.

(Wawancara Kepala bidang penerimaan dan Pengeluaran Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan, Lampiran).

Berdasarkan keterangan Kepala bidang penerimaan dan Pengeluaran Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan tersebut maka dapat diperoleh informasi bahwa semua pihak yang ada di Kabupaten Bulungan terlibat dalam mempengaruhi pengelolaan perekonomian pemerintah daerah. Pihak-pihak tersebut antara lain yaitu aparat daerah, pihak swasta, dan masyarakat.

Dinas-dinas yang berhubungan dengan penyelenggaraan keuangan saling berkoordinasi. Pada pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas-tugas umum pemerintah, dan pembangunan di daerah yang telah ditetapkan dalam UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sebagai pengganti UU No. 18 tahun 1965.

3.1.2. Tugas dan wewenang aparatur pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah antara lain kegiatan menyusun rencana kerja yaitu berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut.

> Tugas dan wewenang aparatur pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah adalah menyusun rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan.

(Wawancara Kepala bidang penerimaan dan Pengeluaran Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan)

Berdasarkan keterangan mengenai tugas dan wewenang aparatur pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan maka diperoleh penjelasan bahwa aparat pemerintah daerah memiliki tugas dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah menjadi tanggungjawab aparatur pemerintah daerah.

Pernyataan Kepala bidang penerimaan dan Pengeluaran Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan sesuai dengan Ketetapan MPR NO.II/MPR/1983 pada poin (a) yang menjelaskan bahwa pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perusahaan-perusahaan milik negara dan milik daerah sebagai aparatur perekonomian negara dilakukan secara terus menerus, agar dapat mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar, dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdi-an terhadap masyarakat. Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) disesuaikan dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 15 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan tahun Anggaran 2017 yaitu memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan strategi daerah, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.1.3. Perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat

Perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat daerah Kabupaten bulungan merupakan bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kondisi perekonomian masyarakat.

Perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat adalah dalam bentuk menyusun rencana kerja yang menyentuh kepentingan umum dan peningkatan pelayanan publik. Adapun beberapa contoh program kegiatan yang merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Bulungan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Menurut kepala bidang pegelolaan dan pengeluaran keuangan Bulungan. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public dan Perencanaan pengembangan budidaya air tawar juga Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan, dan lain-lain.

> *(Wawancara Kepala bidang penerimaan dan Pengeluaran Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan)*

Berdasarkan penyataan Kepala bidang penerimaan dan Pengeluaran Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten bulungan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakatnya. Bukti perhatian yang diberikan pemerintah berupa program-program yang mendukung masyarakat dari segi ekonomi.

Keterlibatan Pemerintah daerah dalam hal sumber daya daerah berkaitan dengan perekonomian di Kabupaten Bulungan artinya pemerintah sebagai pihak yang mengelola keuangan dan sumber daya daerah dengan beberapa elemen yang berpengaruh seperti aparat daerah, pihak swasta, dan masyarakat. Aparat daerah

baik dari eksekutif maupun legislatif memiliki peran dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan termasuk di dalamnya aspek pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Tugas dan wewenang aparatur pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah adalah menyusun rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Contoh program kegiatan yang merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Bulungan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang pertama yaitu Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik. Hal ini dilakukan agar masyarakat paham akan program-program kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah juga dapat merumuskan program kerja dalam kaitannya dengan pengembangan potensi daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, Perencanaan pengembangan

budidaya air tawar dilakukan berdasarkan potensi wilayah Kabupaten Bulungan dilihat dari aspek perairan. Wilayah Kabupaten Bulungan terdapat sungai-sungai besar yaitu Sungai Kayan, Sungai Bandan, Sungai Sesayap, Sungai Pimping, Sungai Sekatak, Sungai Jelarai, Sungai linuang Kayan. Kabupaten bulungan juga merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari Mandul, mangkudulis Besar, Sengatok Besar, Bunyu, Tibi, Karis, Pangkaran, Temenggah, Berasan, Mapat, Baru, Lentimum, Sida, Mangkudutis Kecil, Ibus, Payau, Tutus, Sengatok Kecil, Pekin, Linta, Ijap Mangkupalas, Tengkudacin, Baru, Mengkasak, Selayu, dan sebagainya. Di sebelah Timur wilayah Kabupaten Bulungan berbatasan dengan Laut Sulawesi. Ketiga, Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan, dan lain-lain. Indikator dan pemetan daerah rawan pangan, salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan pada persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2014, pada tahun 2012 persentase penduduk miskin yaitu sebesar 11,76 %, pada tahun 2013 sebesar 12,04%, dan pada tahun 2014 sebesar 12,03%.

3.1.4. Cara Pemerintah menangani permasalahan-permasalahan perekonomian

Permasalahan-permasalahan dari segi ekonomi sangat kompleks maka pemerintah kabupaten bulungan menetapkan, program bantuan SPP dan BP3 untuk seluruh siswa dari TK sampai SMU di Kabupaten Bulungan, Program bantuan beasiswa pendidikan dari kalangan tidak mampu , Program bantuan beras miskin (Raskin) untuk keluarga miskin, Program kompensasi pengurangan subsidi

bahan bakar minyak (PKPS-BBM) di bidang pendidikan, pangan dan kesehatan, Program asuransi kesehatan untuk Keluarga Miskin (Akses Gakin), Program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin, Program pembukaan daerah terisolir dengan pembuatan / peningkatan jalan, Program bantuan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bagi setiap keluarga di daerah ynag belum terjangkau listrik.

> *(Wawancara Kepala bidang penerimaan dan Pengeluaran Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan)*

Berdasarkan kutipan perntataan dari Kepala bidang penerimaan dan Pengeluaran Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan diperoleh penjelasan bahwa pemerintah menetapkan berbagai program dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bulungan. Program-program tersebut ditujukan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulunan.

Cara Pemerintah menangani permasalahan-permasalahan perekonomian yaitu dengan mengadakan Program bantuan SPP dan BP3 untuk seluruh siswa dari TK sampai SMU di Kabupaten Bulungan. Serta program bantuan beasiswa pendidikan dari kalangan tidak mampu. Bantuan ini dapat membantu biaya kebutuhan sekolah bagi pelajar di Kabupaten Bulungan. Kepedulian Pemerintah ditunjukkan dengan membuat kebijakan mengenai program pendidikan gratis yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 tahun 2016 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah. Bagi masyarakat umum Pemerintah juga mengadakan program bantuan beras miskin (Raskin) khusus untuk keluarga miskin. Sehingga dapat

mengurangi tingkat rawan pangan di Kabupaten Bulungan. Pemerintah membuat Program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) di bidang pendidikan, pangan dan kesehatan. Program PKPS-BBM dilakukan untuk membantu masyarakat di Kabupaten Bulungan yang memiliki pendapatan rendah yang terkena dampak kenaikan bahan bakar minyak. Pada bidang pendidikan, program PKPS-BBM berupa beasiswa operasional sekolah (BOS), pada bidang pangan berupa subsidi terhadap kebutuhan pangan seperti adanya subsidi beras, dan pada bidang kesehatan berupa jaminan pelayanan kesehatan. Pemerintah menyelenggarakan Program asuransi kesehatan untuk Keluarga Miskin (Askes Gakin) dengan tujuan menjamin Kesehatan masyarakat di Kabupeten Bulungan. Penyelenggaraan Program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin oleh pemerintah Kabupaten Bulungan agar masyarakat yang berpendapatan rendah dapat tinggal di tempat yang layak. Program pembukaan daerah terisolir dengan pembuatan / peningkatan jalan yang bertujuan agar aksesibilitas di daerah terisolir dapat lebih lancar sehingga mudah khususnya dari segi transportasi untuk distribusi barang dan jasa. Pemerintah menyelenggarakan Program bantuan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bagi setiap keluarga di daerah yang belum terjangkau listrik, sehingga terjadi pemerataan listrik di Kabupaten Bulungan.

3.1.5. Wujud pelayanan pemerintah dalam kaitannya dengan perekonomian masyarakat.

Pelayanan pemerintah merupakan bagian dari kepedulian yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten bulungan.

> Wujud pelayanan pemerintah dalam kaitannya dengan perekonomian masyarakat tertuang dalam prioritas RPJMD kabupaten Bulungan tahun 2016-2021 yaitu peningkatan kualitas SDM, pemenuhan energi dan pengembangan EBT (Energi Baru Terbarukan), pengentasan masyarakat miskin, peningkatan produksi pangan serta peningkatan tata kelola pemerintah yang baik.
> *(Wawancara Kepala bidang penerimaan dan Pengeluaran Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan)*

Berdasarkan kutipan tersebut, artinya bahwa berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi maka patokan atau dasar yang digunakan oleh pemerintah dalam hal pelayanan terhadap perekonomian masyarakat, tertuang dalam RPJM Kabupaten Bulungan tahun 2016-2021.

Pelayanan pemerintah berkaitan dengan perekonomian masyarakat tertuang dalam Peraturan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yang memiliki tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan seluruh Perangkat Daerah. Adapun visinya yaitu “Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri”. Serta Misinya yaitu mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu pusat pangan Nasional, mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi, meningkatkan aksessibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong percepatan pembangunan ekonomi rakyat, investasi daerah, wilayah pedalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan antar wilayah, pemantapan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan perluasan lapangan pekerjaan serta penerapan teknologi maju berbasis agribisnis, mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, maju dan sejahtera, serta

reformasi birokrasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional serta berorientasi pada pelayanan publik.

3.2. Pengelolaan Potensi Daerah

3.2.1. Potensi SDA di Kabupaten Bulungan

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 9 tahun 2014 tentang pedoman pengembangan produk unggulan daerah disebutkan bahwa, Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Potensi Sumber daya alam yang ada di kabupaten Bulungan ada dua jenis sumber daya yakni sumber daya yang dapat terbarukan, seperti sumber pembangkit listrik – sungai, matahari, angin, cangkang sawit. Dan tidak terbarukan, Tambang: emas, batubara, golongan C, Minyak dan Gas. *(Wawancara Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara)*

Berdasarkan kutipan dari pernyataan Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara dijelaskan bahwa Kabupaten Bulungan memiliki beragam

potensi daerah khususnya sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bulungan yaitu sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan, dimana sumber daya alam tersebut merupakan potensi yang dimiliki Kabupaten bulungan dalam mendukung perekonomian daerah.

Setiap daerah memiliki potensi yaitu berupa sumber daya yang dapat dikelola secara bijaksana sehingga dapat digunakan untuk mendukung kehidupan masyarakat, khususnya dari segi ekonomi. Kabupaten Bulungan juga merupakan daerah yang memiliki sumber daya yang berpotensi dalam mendukung baik perekonomian daerah maupun perekonomian masyarakat. Potensi daerah merupakan salah satu indikator yang disebutkan oleh Bappenas pada kajian evaluasi dampak pemekaran darah yang berkaitan dengan produk yang dimiliki suatu daerah dalam mendukung pembangunan.

Kabupaten Bulungan juga sudah memenuhi ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukandan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Berdasarkan berbagai sumber daya alam yang telah disebutkan oleh Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara dan peraturan pemerintah tersebut Kabupaten Bulungan memenuhi salah syarat sebagai dasar pembentukan suatu daerah yaitu potensi daerah yang terdapat pada Pasal 3 poin (b).

3.2.2. Lokasi potensi daerah di Kabupaten Bulungan

Hampir semua kecamatan ada SDA yang menjadi sumber potensi daerah di Kabupaten Bulungan seperti Bunyu memiliki gas dan batubara, Sekatak ada emas,

Tanjung Palas Timur (Sajau), Tanjung Palas Utara, Sekatak-batubara. *(Wawancara Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara)*

Berdasarkan pernyataan Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara disebutkan bahwa hamper semua kecamatan terdapat sumber daya alam, artinya dari segi lokasi ada pemerataan terhadap keberadan sumber daya alam di Kabupaten Bulungan.

Pembangunan perekonomian masyarakat Kabupaten Bulungan erat kaitannya dengan keberadaan potensi daerahnya dan pemanfaatannya. Potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten bulungan macam-macamnya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui antara lain berupa matahari, sungai, gelombang, dan cangkang sawit. Sedangkan Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di Kabupaten Bulungan antara lain yaitu berupa minyak bumi, gas alam/bumi, batubara, dan emas. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia merupakan negara dengan penghasil batu bara terbesar ke-3 di dunia, juga penghasil gas bumi terbesar ke-3 di dunia, sementara minyak bumi peringkat ke-22, dan Emas peringkat ke 12 di dunia. Kabupaten Bulungan turut berpartisipasi dalam menghasilkan barang tambang tersebut.

Lokasi keberadaan Sumber daya alam di Kabupaten Bulungan, hampir ada di setiap kecamatan. Gas bumi terdapat di Bunyu. Batubara terdapat di Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Utara, dan Sekatak. Lokasi yang dimanfaatkan untuk pertambangan emas yaitu di Sekatak. Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten

Bulungan tahun 2012-2032 disebutkan bahwa kawasan yang diperuntukkan untuk dikelola dari sektor pertambangan di Kabupaten Bulungan luasnya kurang lebih 31.590 hektar persebarannya di Kecamatan Bunyu kurang lebih 3.614 hektar, Kecamatan Peso kurang lebih 336 hektar, Kecamatan Sekatak kurang lebih 6.610 hektar, Kecamatan Tanjung Palas Tengah kurang lebih 4.616 hektar, Kecamatan Tanjung Palas Utara kurang lebih 3.257 hektar, Kecamatan Tanjung Selor kurang lebih 317 hektar dan Kecamatan Tanjung Palas Timur kurang lebih 12.839 hektar. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Bunyu, Tanjung Palas Tengah dan Tanjung Palas Timur. Kawasan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Sekatak, Tanjung Palas, Tanjung Selor dan Peso.

Sektor selain pertambangan ada sektor perikanan yang terdapat di wilayah kecamatan Tanjung Palas, Bunyu dan Sesayap. Jenis yang ditangkap antara lain yaitu ikan pelagis, ikan demersal dan ikan karang, udang, bawal , kerapu, Kakap dan sebagainya. Kemampuan lahan di Kabupaten Bulungan yaitu sekitar 359 ribu hektar cocok untuk ditanami kebun sawit.

3.2.3. Pengelolaan potensi daerah di Kabupaten Bulungan

Potensi daerah di Kabupaten Bulungan yang beraneka ragam perlu dilakukan pengelolaan yang tepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut.

> Pengelolaan SDA dilakukan pengolahan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Artinya tidak dilakukan dengan eksploitasi besar-besaran tetapi tetap terukur dan terkendali.
> *(Wawancara Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara)*

Berdasarkan pernyataan tersebut, artinya bahwa potensi daerah yang berupa sumber daya alam di Kabupaten Bulungan disesuaikan dengan kondisi lingkungannya serta keberlanjutannya dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bulungan dilakukan dengan tetap mengacu pada pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Artinya, tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, yang dapat mengakibatkan ketersediaan sumber daya alam akan habis, dan kalau habis masyarakat sendiri yang akan rugi. Pengelolaaan sumber daya alam harus terukur, dan mencari sumber daya alam yang lain untuk bisa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Pengelolaan harus ramah lingkungan, karena jika ekosistem sudah rusak, maka otomatis manusia akan rusak juga. Pengelolaan sumber daya alam arus terkontrol. Oleh sebab itu pada setiap kegiatan pengolahan sumber daya alam harus memiliki kajian studi Amdal. Reklamasi di Kabupaten Bulungan, sementara berjalan pengembangan atau eksplorasi maupun pasca tambang. Wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan dengan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Peso, Peso Hilir, dan Bunyu.

Pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bulungan dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam tidak dilakukan secara besar-besaran harus memperhatikan kontinutas ketersediaan sumber daya alam dan dampaknya bagi lingkungan. Berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam harus maka dalam pemanfaatannya dilakukan secara terukur dan tidak hanya mengeksploitasi satu titik sumber daya alam tetapi juga mencari sumber daya yang lain agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan utama dari pengelolaan

sumber daya alam adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam pemanfaatannya perlu memperhatikan lingkungan karena jika pengelolaannya tidak ramah lingkungan maka ekosistem akan rusak sehingga. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan maka dapat mengakibatkan ketersediaan sumber daya alam berkurang bahkan habis. Sehingga dapat berdampak pada kehidupan di masa mendatang, generasi berikutnya kesulitan dalam mendapatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah dalam menangani masalah sumber daya alam, melakukan program reklamasi yang saat ini untuk sementara berjalan pada tahap pengembangan atau eksploitasi maupun pasca tambang.

Pemanfaatan sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam mempunyai nilai guna untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan baik bagi masyarakat, pemerintah daerah (negara), maupun pemerintah pusat. Sumber daya alam dikelola agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi pihak swasta juga ikut berperan dalam membangun perekonomian daerah. Pengelolaan potensi daerah berupa sumber daya alam akan meningkatkan merekonomian melalui royalty, pajak, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam akan digunakan untuk pembangunan. Pendapatan yang diperoleh daerah akan dipakai untuk membangun infrastuktur, suprastruktur, dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibangun atau dikembangkan seperti pendidikan, kesehatan,

lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Pada pembangunan daerah berlaku teori *multiplier effect*, yang artinya meningkatkan pengeluaran untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan pendapatan daerah yaitu dengan pertambahan Investasi dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Bulungan, maka akan meningkatkan pendapatan nasional begitupun sebaliknya. Salah satu pembangunan di Kabupaten Bulungan yaitu sarana transportasi. Kalau transportasi tidak lancar maka biaya akan sangat mahal. Di Kabupaten Bulungan, biaya hidup hampir sama dengan biaya-biaya di daerah lain seperti di Jawa karena adanya membangun infrastuktur berupa jalan, pelabuhan, bandara dan sebagainya sehingga keluar masuk barang lebih mudah, lancar, dan murah.

Pengelolaan potensi daerah khususnya energi sumber daya mineral, pihak yang berwenang yaitu ada di pemerintahan pusat, provinsi, gubernur, maupun bupati. Masing-masing pihak memiliki kewenangan menyangkut masalah wilayah antara lain yaitu untuk penetapan wilayah itu di Pemerintahan Pusat, untuk masalah pelakasanaan kewenangannya ada di tingkat provinsi, dan menyangkut masalah teritorial kewenangannya ada di tingkat kabupaten. Pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang menyebutkan bahwa unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah. Pemerintah di tingkat provinsi berwenang dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Jika pihak penambang tidak melakukan pengelolaan dengan baik maka pemerintah dapat menghentikan penambangan,

tapi kalau memang pengelolaan berjalan dengan baik maka pemerintah mendukung berjalannya kegiatan penambangan.

3.2.4. Alasan pemanfaatan potensi daerah

Alasan pemanfaatan daerah merupakan tujuan dari pengelolaan potensi yang ada di daerah Kabupaten Bulungan, sesuai dengan pernyataan berikut:

> Untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dari hasil pajak, royalty tambang digunakan untuk pembangunan Kabupaten Bulungan.
> (Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, Lampiran)

Berdasarkan pernyataan Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara tersebut, artinya bahwa tujuan pemanfaatan potensi daerah dengan pengelolaanya dilakukan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan. Alasan pemanfaatan potensi daerah yaitu memenuhi persyaratan daerah otonom dari segi ekonomi yang sesuai dengan ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah yang mensyaratkan adanya kemampuan ekonomi sebagai calon daerah otonom.

Berbagai potensi daerah yang dimiliki Kabupaen Bulungan seperti yang disebutkan oleh Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, juga merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai secara ekonomi untuk mendukung pemerataan dan pengembangan pembangunan di kabupaten Bulungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 yang menyebutkan bahwa potensi daerah merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.5. Pihak yang berwenang dalam pengelolaan potensi daerah

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan potensi daerah di Kabupaten Bulungan sesuai dengan pernyataan berikut.

> Untuk ESDM kewenangan ada di Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat daerah (BAB I Pasal 1 Nomor 37) sesuai dengan UU minerba UU NO. 4 Tahun 2009.
> (Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, *Lampiran*)

Berdasarkan pernyataan Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, artinya bahwa UU minerba UU NO. 4 Tahun 2009 merupakan dasar yang diambil berkaitan dengan kewenangan dan tanggungjawab terhadap pengelolaan potensi daerah. Kalimantan Utara termasuk di dalamnya Kabupaten Bulungan dalam upaya pengelolaan potensi memenuhi peraturan perundang-undangan terkait tugas pokok dan fungsi sebagai aparat pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan daerah.

Kabupaten bulungan sebagai bagian dari Kalimantan Utara memenuhi aturan yang ditetapkan yaitu pada BAB I Pasal 1 Nomor 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya Gubernur Kalimantan Utara, Bupati Kabupaten Bulungan, dan Perangkat daerah Kabupaten Bulungan merupakan pihak yang berwenang dalam pengelolaan potensi daerah di Kabupaten Bulungan.

3.3 Kondisi Perekonomian Masyarakat

3.3.1. Kondisi Perekonomian masyarakat di Kabupaten Bulungan

Kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Bulungan sebagai daerah yang otonom, sesuai dengan pernyataan berikut.

> Semakin pendeknya rentan kendali kebijakan semenjak menjadi Daerah Otonomi Baru Provinsi Kalimantan Utara, rentan kendali aktivitas ekonomi pun menjadi lebih pendek sehingga bisa memicu pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Utara, termasuk di dalamnya Kabupaten Bulungan. Dengan ditetapkannya Kota Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara secara tidak langsung membawa perkembangan baik bagi Kabupaten Bulungan menjadi meningkat, geliat kegiatan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan sumber penggerak kegiatan tersebut yaitu pelaksana kegiatan dan masyarakat umum. Dengan bertambahnya jumlah penduduk ini geliat perekonomian pun semakin meningkat karena semakin tinggi jumlah pengguna sarana ekonomi semakin meningkat pula iklim investasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
> *(Wawancara Kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bulungan)*

Berdasarkan pernyataan Kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bulungan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Bulungan dipengaruhi oleh rentan kendali kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintahan yang baru menjadi pendukung dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Bulungan. Sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang menyebutkan bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara lain/tetangga.

Adanya penetapan Kota Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Bulungan. Sebagai Ibukota, daerah Tanjung Selor menjadi pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan utara, sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bulungan, khususnya dari segi fasilitas yang dapat mendukung lancaranya pemerintahan. Keadaaan ini juga mempengaruhi aksesibilitas di Kabupaten Bulungan menjadi lebih mudah, sehingga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

3.3.2. Faktor yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat

Perekonomian masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sesuai dengan pernyataan bapak kepalas bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bulungan. Seperti Sumber daya manusia, Sumber daya alam, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Budaya dan kebiasaan masyarakat yang ada, Sumber daya modal serta Kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. *(Wawancara Kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bulungan)*

Berdasarkan pernyataan Kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bulungan, artinya bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Masyarakat merupakan elemen penting karena apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan bagi masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bulungan akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Sehingga masyarakat dapat menjadi media evaluasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berkaitan dengan pengelolaan potensi daerah kebijakan yang dibuat akan berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat. Karena pada dasarnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dibuat demi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2012-2015 perekonomian kondisi perekonomian dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulungan

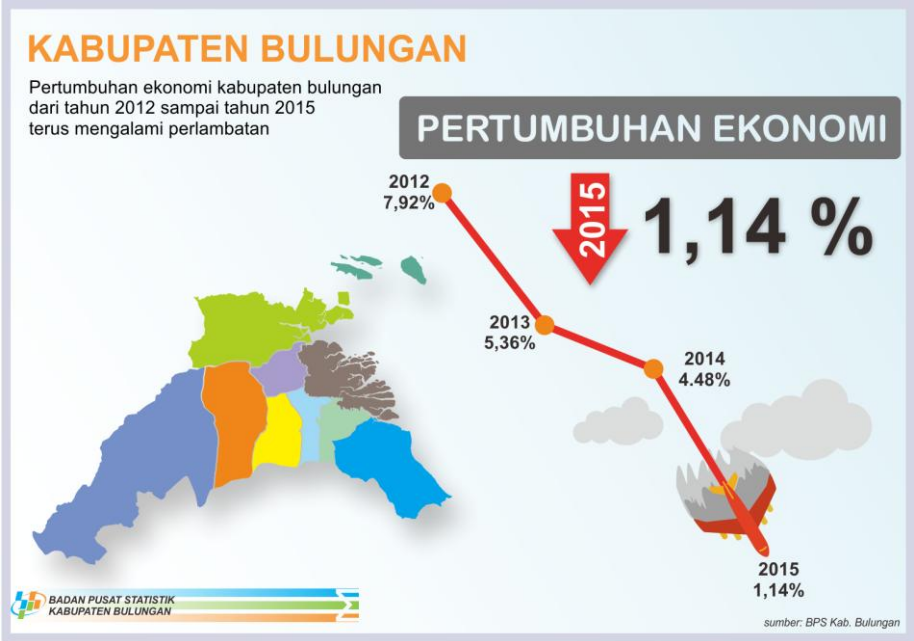

Sumber: BPS Kabupaten Bulungan

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2015 pertumbuhan ekonomi kabupaten Bulungan mengalami perlambatan. Namun pada tahun-tahun berikutnya hingga saat ini perekonomian di Kabupaten Bulungan

mengalami kemajuan. Hal ini disebabkan karena semakin pendeknya rentan kendali kebijakan semenjak menjadi Daerah Otonomi Baru Provinsi Kalimantan Utara, rentan kendali aktivitas ekonomi di Kabupaten Bulungan menjadi lebih pendek sehingga bisa memicu pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bulungan. Salah satu faktor berkembangnya Kaupaten Bulungan yaitu adanya penetapan Kabupaten Bulungan sebagai ibukota Provinsi kalimantan Utara yang lebih tepatnya berada di Tanjung Selor.

Faktor yang mempengaruhi perekonomian masyarakat di Kabupaten Bulungan yaitu pertama, Sumber daya manusia baik dari segi kualitas, pendidikan, maupun kesehatan. Kedua, sumber daya alam baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kemudian diolah agar memiliki nilai sehingga dapat menjadi sumber penghasilan bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat membantu dalam pengelolaan potensi daerah agar lebih efektif dan efisien. Keempat, budaya dan kebiasaan masyarakat setempat, yang dapat membantu meningkatkan pembangunan perekonomian di Kabupaten Bulungan. Kelima, Sumber daya modal yang berupa investasi-investasi baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Keenam, kebijakan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam perekonomian masyarakat bertujuan demi kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan agar pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, menjadikan dukungan masyarakat lebih nyata dan lebih responsif.

3.3.3. Pengaruh pemekaran wilayah provinsi Kalimantan Utara

Pemekaran wilayah memiliki pengaruh terhadap pembangunan dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan berikut:

> Semakin pendeknya rentan kendali kebijakan maka pembentukan Provinsi Kalimantan Utara bisa mengoptimalkan perkembangan potensi ekonomi daerah kalimantan Utara, mendekatkan pembangunan, serta memperpendek jarak birokrasi, dalam arti menjadikan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, menjadikan dukungan masyarakat lebih nyata, menyediakan kesempatan yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih respponsif.
> (Kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bulungan, *Lampiran*)

Berdasarkan pernyataan Kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bulungan, dijelaskan bahwa ada hubungan antara rentan kendali kebijakan daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Bulungan dengan perkembangan ekonomi daerahnya serta mempersepit jarak pemerintah dengan masyarakat sehingga mayarakat dapat turut berpartisipasid alam pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan perekonomian daerahnya.

Sesuai dengan peraturan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, bahwa Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintah yang dimaksud dalam Undang-Undang ini yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diartikan bahwa Pemekaran daerah

Kalimantan Utara memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang diambil khususnya berkaitan dengan perekonomian di seluruh wilayahnya termasuk di dalamnya Kabupaten Bulungan.

3.3.4. Dampak positif pemekaran daerah Kalimantan Utara

Pemekaran di Kalimanyan utara memiliki dampak positif bagi Kabupaten Bulungan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan berikut mengenai dampak-dampak positif pemekaran Kalimantan Utara. Pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat sehingga bisa meningkatkan mobilitas masyarakat Kalimantan Utara sehingga perputaran ekonomi bisa berjalan cepat, Meningkatkannya jumlah penduduk bisa meningkatkan iklim investasi di Kalimantan Utara, Meningkatknya Investasi bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulungan dan juga Pembangunan wilayah terpencil atau perbatasan bisa lebih diperhatikan. *(Wawancara Kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bulungan)*

Berdasarkan kutipan pernyataan dari Kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bulungan, dijelaskan bahwa pemekaran daerah Kalimantan Utara berdampak positif dari segi pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, peningkatan pendapatan daerah, dan adanya pembangunan wilayah terpencil.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan tatacara penyususnan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip perencanaan pembangaunan daerah yaitu, merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bulungan berkaitan dengan pemekaran wilayah akan berdampak pada perekonomian masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif pemekaran daerah Kalimantan Utara, antara lain sebagai berikut.

1. Pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat sehingga bisa meningkatkan mobilitas masyarakat Kalimantan Utara sehingga perputaran ekonomi bisa berjalan cepat. Dengan lancarnya mobilitas maka distribusi barang dan orang juga berjalan dengan baik. Sehingga terjadi pemerataan di segala aspek di semua wilayah di Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Bulungan. Kebutuhan masyarakat pun dapat terdistribusikan dengan baik. Tetapi jika mobilitas terganggu maka akan mempersulit distribusi baik barang maupun orang. Pembangunan infrastruktur yang berupa jaringan transportasi di Kabupaten Bulungan bermanfaat dalam aspek keterjangkauan sistem pusat pelayanan antar daerah, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mendorong pambangunan daerah secara ekonomi. Kabupaten Bulungan wilayahnya memiliki pulau-pulau kecil sehingga perlu adanya jaringan trasportasi air yang mampu menjangkau setiap pulaunya, demi pemerataan kesejahteraan

masyarakat. Kelancaran mobilitas di setiap wilayah baik di daratan utama maupun pulau-pulau yang menyertainya mampu meminimalisir ketimpangan secara ekonomi. Pelabuhan di Kabupaten Bulungan salah satunya yaitu Pelabuhan Pulau Bunyu di Kecamatan Bunyu dan Pelabuhan Tanjung Selor di Kecamatan Tanjung Selor. Bandara yang ada di Kabupaten Bulungan yaitu Bandar Udara Tanjung Harapan di KecamatanTanjung Selor. Kabupaten Bulungan, lebih tepatnya di Tanah Kuning merupakan kawasan yang strategis karena menjadi jalur pelayaran nasional dan internasional.

2. Meningkatkannya jumlah penduduk bisa meningkatkan iklim investasi di Kalimantan Utara. Semakin meningkat jumlah penduduk maka kuantitas kebutuhan akan meningkat sehingga perlu adanya penghasilan atau pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perolehan pendapatan dapat dilakukan dengan menggali atau mengolah potensi daerah Kabupaten Bulungan yang didukung dengan investasi. Faktor bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan perekonomian semakin meningkat karena semakin tinggi jumlah pengguna sarana ekonomi, maka semakin meningkat pula iklim investasi.
3. Meningkatknya Investasi bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulungan. Peningkatan investasi berkaitan dengan modal yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan potensi daerah Kabupaten Bulungan. Sehingga pengelolaan potensi daerah dapat dilakukan secara optimal yang akan berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulungan. Di Kabupaten Bulungan sektor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan

pendapatan asli daerah yaitu sektor pertambangan. Kegiatan pertambangan mencakup merubah batubara, minyak bumi dan gas bumi menjadi suatu produk seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, yang merupakan kegiatan pengolahan minyak bumi menjadi suatu produk yang berguna bagi pendapatan asli daerah yang nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Produk yang dihasilkan dari pengolahan pertambangan antara lain yaitu minyak tanah, gas hidrokarbon, kokas, propane, butane, petrol, metan, gas etane, butane, propane dan gasoline. Pengelolaan sumber daya batubara dilakukan dengan pengoperasian tungku batubara, semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. Penurunan ketersediaan barang tambang dari sumur yang sudah lama, dan belum adanya penambahan eksploitasi sumur baru, mengakibatkan penggalian dan pertambangan di Kabupaten Bulungan mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya selama tahun 2011 hingga 2014.

4. Pembangunan wilayah terpencil atau perbatasan bisa lebih diperhatikan. Seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Bulungan memiliki wilayah yang berbentuk kepulauan, maka dalam pengeloaan wilayahnya perlu perhatian berkaitan dengan keterjangkauan antar wilayah, fasilitas umum dan juga pelayanannya. Adanya pemekaran wilayah, pemerintah daerah menjadi lebih fokus dalam mengelola wilayahnya. Sehingga wilayah yang sebelumnya terpencil mendapat perhatian untuk dikelola dengan baik seperti wilayah yang lain. Adapun Pulau-pulau kecil yang dikembangkan di Kabupaten Bulunga

antara lain yaitu Pulau Burung di kecamatan Bunyu, Pulau Peking di kecamatan Tanjung Palas Tengah, Pulau Pas Payau di kecamatan Sekatak.

3.3.5. Dampak negatif pemekaran daerah Kalimantan Utara

Dampak negatif dari pemekaran daerah Kalimantan Utara belum dirasakan oleh daerah Kabupaten Bulungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut.

> Sejauh ini bagi kabupaten Bulungan belum ada dampak negatif dari pemekaran daerah Kalimantan Utara. Hanya saja yang harus selalu dievaluasi adalah apakah kebijakan pemekaran ini benar-benar bisa mewujudkan cita-cita mulia dari pembentukan DOB jangan Cuma jalan memunculkan penguasa-penguasa kecil baru di daerah. Selain itu pembentukan DOB ini benar-benar bisa memperpendek jarak pelayanan terhadap masyarakat sehingga tidak sekedar menjadi beban tambahan bagi Pemerintah Pusat (APBN) akan tetapi manfaatnya bisa dirasakan nyata.
> *(Wawancara Kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bulungan)*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa walaupun dampak negatif pemekaran daerah Kalimantan Utara belum terjadi di Kabupaten Bulungan, namun tetap perlu dilakukan evaluasi mengenai kebijakan-kebijakan pemekaran agar dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan ketika membentuk daerah otonom baru.

Pemekaran daerah Kalimantan Utara belum berdampak negatif terhadap Kabupaten Bulungan. Namun, perlu dilakukan evaluasi tentang kebijakan pemekaran agar bisa mewujudkan cita-cita mulia dari pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru). Selain itu pembentukan DOB ini benar-benar bisa memperpendek jarak pelayanan terhadap masyarakat sehingga tidak sekedar menjadi beban tambahan bagi Pemerintah Pusat (APBN) akan tetapi manfaatnya bisa dirasakan secara nyata. Pembentukan Daerah Otonom Baru ditujukan agar kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dengan meningkatkan pembangunan di

berbagai sektor di Kabupaten Bulungan. Pembangunan daerah pada tahun 2017 diatur dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 15 tahun 2016 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2017 yang ditetapkan demi kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan daerah supaya dapat berjalan secara tepat sasaran, efisien dan efektif berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016-2021.